

**IMPLEMENTATION OF THE JAKARTA DISABILITY CARD PROGRAM
(KPDJ) IN REALIZING PROSPERITY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
IN KAYU PUTIH SUBDISTRICT EAST JAKARTA**

**By:
Muhammad Fidel Elang Ramadhan
E1B021023**

ABSTRACT

Persons with disabilities are one of the vulnerable groups who have the right to protection, empowerment, and the fulfillment of basic needs from the state. Realizing the importance of this, the Jakarta Provincial Government responded through the Jakarta Disability Card Program (KPDJ) policy. This study aims to analyze the implementation of KPDJ in realizing prosperity for people with disabilities in Kayu Putih Subdistrict, East Jakarta, as well as identify supporting and inhibiting factors. The approach method used is empirical juridical with descriptive research specifications. The types and sources of data include primary data and secondary data obtained through interviews, literature studies, and documentation which are then analyzed qualitatively through the process of reduction, categorization, and data presentation. The results of the study show that the implementation of KPDJ has gone well. This can be seen from 4 (four) parameters, namely, the target recipients of the KPDJ Program have been implemented optimally, the procedures or mechanisms for the implementation of the KPDJ Program have been carried out properly, the duration and amount of KPDJ Program Assistance have been fulfilled in accordance with applicable regulations, monitoring, evaluation and reporting of the KPDJ Program have been carried out properly. Supporting factors include regulations regarding the complete KPDJ program, a collaborative approach between the families of the community receiving social assistance and social companions and quick assistance from social companions and companions from RT and RW to help in handling obstacles. Meanwhile, the obstacles found include people with disabilities who are difficult to verify due to limited communication, low understanding of administrative procedures and potential technical problems in the DTKS system that can hinder the implementation of the KPDJ Program.

Keywords: Disability; Policy Implementation; KPDJ; Prosperity.

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PENYANDANG DISABILITAS
JAKARTA (KPDJ) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KELURAHAN KAYU PUTIH JAKARTA
TIMUR**

**Oleh:
Muhammad Fidel Elang Ramadhan
E1B021023**

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemberdayaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dari negara. Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons melalui kebijakan Program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KPDJ dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, kategorisasi, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KPDJ telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) parameter yaitu, sasaran penerima Program KPDJ sudah diterapkan secara optimal, Tata Cara atau mekanisme pelaksanaan Program KPDJ telah dijalankan dengan baik, Jangka Waktu dan besaran Bantuan Program KPDJ telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program KPDJ telah dilaksanakan dengan baik. Faktor pendukung meliputi regulasi mengenai program KPDJ yang lengkap, pendekatan kolaboratif antara keluarga masyarakat penerima bantuan sosial dengan pendamping sosial dan bantuan cepat dari pendamping sosial dan pendamping dari RT dan RW membantu dalam penanganan kendala. Sementara itu, hambatan yang ditemukan antara lain penyandang disabilitas sulit diverifikasi karena keterbatasan komunikasi, rendahnya pemahaman warga terhadap prosedur administrasi dan potensi gangguan teknis pada sistem DTKS yang dapat menghambat pelaksanaan Program KPDJ.

Kata Kunci: Disabilitas; Implementasi Kebijakan; KPDJ; Kesejahteraan.